



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR TAHUN 2014-2023

Syakroni Arif Hidayat¹, Anwar², Agus Suharsono³, Yaen Miftakhul Laily⁴, Muhamad Nanda Al Hakim Akbar⁵, Fajri Maulana⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Jember, Indonesia

Email: syakroniarifhidayatxiiakl@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i2.2132>

Sections Info

Article history:

Submitted: 27 January 2026

Final Revised: 11 February 2026

Accepted: 16 March 2026

Published: 30 April 2026

Keywords:

Local Own-Source Revenue

General Allocation Fund

Regional Financial-

Independence

Fiscal- Decentralization



ABSTRACT

This research aims to explain the effect of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) and the General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum/DAU) on Regional Financial Independence (Kemandirian Keuangan Daerah/KKD) of regency and municipal governments in East Java Province during the period 2014–2023. Regional financial independence is an important indicator for assessing the ability of local governments to finance governmental functions and development activities without excessive dependence on central government transfers. This study employs a quantitative approach with an associative research design. The population includes all regencies and municipalities in East Java, using a saturated sampling technique that results in 29 regencies and 9 municipalities as research samples. Secondary data in the form of realized PAD and DAU were obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and Statistics Indonesia. Data analysis methods include descriptive statistics, multiple linear regression, classical assumption tests, and partial and simultaneous significance tests. The results indicate that PAD has a positive and significant effect on regional financial independence, while DAU has a negative and significant effect on regional financial independence. Simultaneously, PAD and DAU significantly affect regional financial independence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014–2023. KKD merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dengan teknik sampling jenuh yang menghasilkan 29 kabupaten dan 9 kota sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa realisasi PAD dan DAU yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode analisis data meliputi statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik, serta uji signifikansi parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD, sedangkan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KKD. Secara simultan, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap KKD.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Kemandirian Keuangan Daerah; Desentralisasi Fiskal

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap kemandirian keuangan daerah (KKD). Tempat yang akan diteliti adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur dan menggunakan data tahun 2014-2023. KKD mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) mampu menjalankan otonomi daerah (OTODA) secara mandiri (Karenina et al., 2021). Semakin tinggi KKD, maka derajat ketergantungan Pemda terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat atau bisa disebut transfer ke daerah (TKD) menjadi semakin rendah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya, yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan OTODA sebagai implementasi prinsip desentralisasi (Sudarmana & Sudiartha, 2020). DAU merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Pemda dengan tujuan mengurangi ketimpangan kapasitas keuangan antar daerah, sehingga daerah memiliki kemampuan yang lebih memadai dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan (Majid, 2019).

OTODA merupakan hak, wewenang, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya (Republik Indonesia, 2014). Penerapan OTODA di Indonesia secara legal dimulai pasca implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Seiring perkembangan sistem pemerintahan, UU No. 32 Tahun 2004 digantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan OTODA hingga saat ini. Kebijakan ini lahir dari tuntutan reformasi yang menekankan pentingnya desentralisasi sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, demokratis, dan efisien dalam pelayanan publik (Nasir, 2019). Keberadaan OTODA memberikan kesempatan setiap daerah untuk lebih berkembang melalui pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah secara mandiri.

Pelaksanaan OTODA menuntut untuk setiap daerah memiliki kemandirian keuangan serta menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap TKD (Afandi dkk., 2016). KKD dapat menjadi indikator untuk mengukur kinerja pelaksanaan OTODA (Karenina dkk., 2021). KKD dapat tercapai apabila Pemda memiliki kapabilitas untuk mengelola aspek keuangannya secara mandiri. Kondisi ini mengindikasikan ketergantungan fiskal terhadap TKD dapat diminimalisasi secara signifikan. Rasio KKD dapat diukur melalui PAD dibagi bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat atau TKD. Pemda yang memiliki tingkat kemandirian tinggi menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola dan mengoptimalkan PAD secara efektif (Saputra & Fernando, 2017). Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014-2023 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Provinsi DKI Jakarta (Rp40,8 Triliun) menempati urutan pertama sebagai daerah dengan rata-rata PAD tertinggi di Indonesia. Posisi ini diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (Rp19,3 Triliun) dan Jawa Timur (Rp18,1 Triliun). DKI Jakarta (225,18%) juga menempati urutan pertama sebagai Provinsi dengan rata-rata rasio KKD tertinggi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur (159,74%) justru menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (158,56%).

Tabel 1. Rasio KKD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat	KKD
2014	Rp14.442.216.534.959	Rp6.330.267.357.772	228,15%
2015	Rp15.402.647.674.503	Rp6.825.802.553.472	225,65%
2016	Rp15.817.795.024.797	Rp9.144.327.452.273	172,98%
2017	Rp17.324.177.664.424	Rp12.539.853.347.082	138,15%
2018	Rp18.531.062.021.823	Rp13.408.125.357.620	138,21%
2019	Rp19.327.125.485.406	Rp14.128.083.842.581	136,80%
2020	Rp17.950.996.508.801	Rp13.680.028.262.817	131,22%
2021	Rp18.935.885.925.146	Rp15.344.823.195.178	123,40%
2022	Rp21.256.651.207.716	Rp10.648.125.209.728	199,63%
2023	Rp22.317.204.435.685	Rp11.450.661.800.943	194,90%
Rata-Rata	Rp18.130.576.248.326	Rp11.350.009.837.947	159,74%

Sumber: DJPK (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 1, KKD Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren fluktuatif meskipun secara umum PAD mengalami peningkatan dari Rp14,44 triliun pada 2014 menjadi Rp22,32 triliun pada 2023. Rasio kemandirian tertinggi tercapai pada 2014 sebesar 228,15%, yang mencerminkan dominasi PAD terhadap bantuan pemerintah pusat. Namun, rasio ini menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah pada 2021 sebesar 123,40%, menandakan meningkatnya ketergantungan terhadap TKD. Setelah itu, terjadi pemulihan signifikan pada 2022 dan 2023, dengan rasio kembali meningkat menjadi 199,63% dan 194,90%. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Timur memiliki kapasitas fiskal yang cukup kuat, dinamika nasional seperti pandemi COVID-19 dan kebijakan fiskal pusat turut memengaruhi.

Namun, capaian positif di tingkat provinsi tersebut ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan data LRA tahun 2014- 2023 yang dirilis oleh DJPK dan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata tingkat KKD di Provinsi Jawa Timur menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam antara Kabupaten/Kota. Jika diklasifikasikan berdasarkan kategori rasio kemandirian, sebagian besar daerah (94,7%) masih berada dalam kategori rendah (0-50%), seperti Kabupaten Bangkalan, Bondowoso, Sampang, Pacitan, dan sebagian besar Kabupaten/Kota lainnya yang mengindikasikan dominasi ketergantungan terhadap bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat atau TKD. Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kemampuan fiskal yang mulai berkembang dengan kontribusi PAD lebih signifikan terhadap pembiayaan daerah, sehingga bisa berada pada kategori sedang (51-75%). Sementara itu, tidak ada Kabupaten/Kota yang berhasil masuk dalam kategori tinggi (76-100%). Puncaknya, Kota Surabaya menempati kategori sangat tinggi (>100%), yang berarti PAD-nya telah mampu melampaui kebutuhan pembiayaan dari dana TKD, menjadikannya sebagai daerah paling mandiri secara fiskal di Provinsi Jawa Timur. Pola ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota dengan basis ekonomi yang mapan cenderung memiliki KKD yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di wilayah pesisir selatan, tapal kuda, atau Madura.

Rasio KKD dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor diantaranya adalah PAD

dan DAU (Fadillah Yulkhaq & Amiranto, 2024; Bella et al., 2022; Melly Pitria et al., 2023; Nainggolan et al., 2023; Nur Indah Fitriyani et al., 2021; Rosana, 2024). PAD mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa bergantung pada TKD. PAD berpengaruh terhadap KKD (Adriana & Rustam, 2024; Atmoko & Khairudin, 2022; Debora et al., 2023; Fadhila & Susilowati, 2025; Indiraningrum & Priyono, 2023; Kristina et al., 2021; Novianti & Farouq, 2022; Riyandi & Anggraini, 2022). PAD tidak berpengaruh terhadap KKD (Kusmila, 2023; Putri & Mulyandani, 2025; Riza & Zuripal, 2023). Perbedaan hasil penelitian ini dikarenakan adanya keragaman karakteristik antar daerah, seperti potensi ekonomi, struktur pendapatan, dan kapasitas kelembagaan yang berdampak pada ketimpangan fiskal antar daerah. Pemda dengan PAD tinggi belum tentu menghasilkan kemandirian fiskal yang kuat jika pengelolaannya tidak efektif atau belanja masih bergantung pada TKD

Keragaman karakteristik antar daerah menyebabkan perbedaan jumlah PAD. Bantuan dari Pemerintah Pusat atau TKD berperan dalam mengurangi disparitas fiskal antar daerah. DAU merupakan bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Tujuan dialokasikannya DAU adalah untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. DAU berpengaruh terhadap KKD (Afriyan Firminda et al., 2024; Anggi Wahyu Puspita & Gideon Setyo Budiwitjaksono, 2023; Azari & Sutrisna, 2022; Surya Abbas et al., 2024). DAU tidak berpengaruh terhadap KKD (Andrianda & Rosada, 2024; Fadhiilah & Widiastuty, 2024; Nurvaliza & Hamdani Putra, 2024; Riyadi, 2022; Setiawan et al., 2021; Yahya & Diah Widajantie, 2023). Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan oleh kualitas tata kelola dan orientasi penggunaan DAU. Daerah dengan manajemen keuangan yang efektif, DAU dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, sedangkan di daerah lain hanya digunakan untuk belanja rutin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode ini diterapkan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel X (variabel independen) yaitu PAD (X1) dan DAU (X2) dengan variabel Y (variabel dependen) yaitu KKD. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tahun 2014-2023. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2023.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Data sekunder yang terlibat pada penelitian ini adalah data runtut waktu (time series) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur periode 2014-2023. Sumber data yang digunakan adalah LRA pendapatan dan belanja Pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2023 yang berupa data realisasi PAD dan DAU yang diperoleh melalui website DJPK dan BPS.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji signifikansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai

minimum, maksimal, rata-rata, dan standar deviasi adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

a. Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai PAD maksimum mencapai Rp5.771.818.530.453 yang diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2023, sedangkan nilai minimum tercatat sebesar Rp80.493.920.959 yang dimiliki Kota Batu pada tahun 2014. Rata-rata PAD dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah Rp496.377.541.552. Nilai rata-rata ini memberikan gambaran umum tentang kualitas otonomi daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

b. Dana Alokasi Umum

Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai DAU maksimum mencapai angka Rp1.765.927.493.000 yang diperoleh Kabupaten Jember pada tahun 2019, sedangkan nilai minimum tercatat sebesar Rp83.588.340.000 yang diperoleh Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014. Rata-rata DAU dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah Rp925.052.230.723. Nilai rata-rata ini memperlihatkan gambaran umum berkenaan dengan tingkat kemampuan pendanaan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

c. Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa nilai KKD maksimum mencapai angka 1,80 (180%) yang didapatkan Kota Surabaya pada tahun 2017, sedangkan nilai minimum tercatat sebesar 0,08 (8%) yang diperoleh Kabupaten Sampang pada tahun 2021. Rata-rata KKD dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah 0,24 (24%). Nilai rerata ini mengimplikasikan bahwa mayoritas Pemda di Jawa Timur masih mencatatkan KKD yang berada pada tingkat rendah, sehingga menunjukkan ketergantungan yang relatif tinggi terhadap TKD.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji statistik. Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		294
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01791833
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,047
	Negative	-,045
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Merujuk pada hasil analisis statistik yang tersaji pada tabel 3, diketahui bahwa jumlah data (N) yang digunakan sebanyak 294 observasi, dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh 0,200. Nilai signifikansi tersebut melebihi ambang batas taraf signifikansi 0,05, maka dapat ditarik inferensi bahwa data residual pada model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Nilai *Varian Inflation Factors* (VIF) digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	,193	,004		51,753	,000		
	Pendapatan Asli Daerah	4,330E-13	,000	1,221	62,157	,000	,621	1,610
	Dana Alokasi Umum	-1,647E-13	,000	-,685	-34,866	,000	,621	1,610

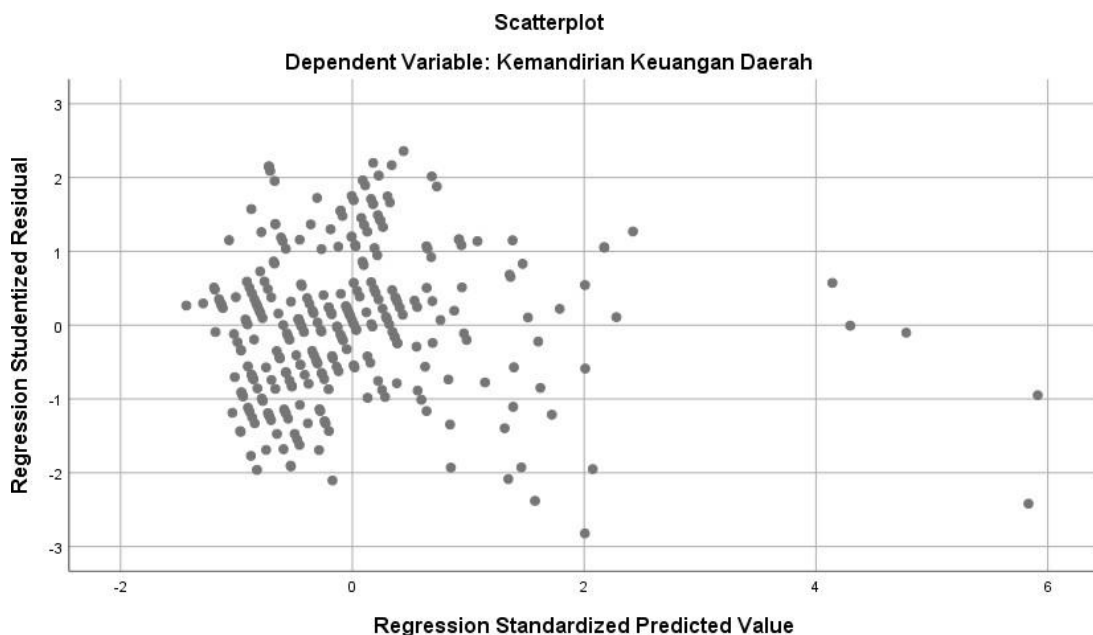
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Merujuk pada hasil analisis statistik yang tersaji pada tabel 4, diperoleh nilai VIF pada setiap variabel bebas sebesar 1,610, maka nilai VIF < 10. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas. Secara substantif, kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak ditemukan hubungan atau interdependensi yang signifikan antara variabel independen yang digunakan, yaitu PAD (X1) dan DAU (X2).

c. Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *scatter plot* melalui visualisasi data nilai ZPRED (nilai prediksi) terhadap SPRESID (nilai residual) pada grafik.



Gambar 1. Hasil uji heteroskedastisitas (Sumber: Data sekunder diolah, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 1, diketahui bahwa titik- titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik berupa pola bergelombang, menyempit, maupun melebar. Titik-titik tersebut juga tersebar di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y. Pola penyebaran residual yang acak (tidak membentuk pola tertentu) mengindikasikan bahwa varians residual memiliki sifat konstan pada setiap tingkat nilai prediksi. Sebagai implikasi logisnya, model regresi yang diterapkan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan apabila $dU < d < (4-dU)$ maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5. Hasil uji autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,951 ^a	,904	,904	,01460	2,086

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Merujuk pada hasil analisis statistik yang tersaji pada tabel 5, tersaji data bahwa hasil pengujian autokorelasi dengan DW menghasilkan nilai 2,086. Hasil substitusi pada dasar keputusan yaitu $dU (1,822) < 2,086 < 4-dU (2,178)$. Berdasarkan hasil pengujian statistik, dapat ditarik inferensi bahwa model regresi terbebas dari gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil analisis regresi linear berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,080	,002		32,741	,000
	PAD	4,126E-13	,000	1,087	52,355	,000
	DAU	-1,517E-13	,000	-,488	-23,520	,000

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Berdasarkan output analisis regresi linear berganda pada tabel 6, maka persamaan model regresi berganda antara variabel X1 dan X2 terhadap Y yaitu:

$$Y = 0,080 + 4,126 X1 - 1,517 X2 + e$$

Hasil estimasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan dan diuraikan secara substantif sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,080. Artinya apabila semua variabel bebas yaitu PAD dan DAU bernilai 0, maka nilai tingkat KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sebesar 8%.
2. Koefisien regresi variabel PAD menunjukkan nilai positif sebesar 4,126. Artinya setiap PAD mengalami kenaikan satu-satuan, maka KKD pada Kabupaten/Kota se- Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar 4,126.
3. Koefisien regresi variabel DAU menunjukkan nilai negatif sebesar -1,517. Artinya setiap DAU mengalami kenaikan satu-satuan, maka KKD pada Kabupaten/Kota se- Jawa Timur akan mengalami penurunan sebesar 1,517.

Uji Signifikansi

- a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 1 Hasil uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,080	,002		32,741	,000
	PAD	4,126E-13	,000	1,087	52,355	,000
	DAU	-1,517E-13	,000	-,488	-23,520	,000

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data sekunder, diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial pada tabel 4.7, diperoleh nilai t hitung dan signifikansi pada masing-masing variabel independen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh PAD Terhadap KKD

Hasil pengujian menunjukkan variabel PAD memiliki nilai t hitung sebesar 52,355 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan nilai t hitung

> nilai t tabel ($52,355 > 1,968$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, secara parsial variabel PAD (X_1) berpengaruh terhadap variabel KKD (Y).

2. Pengaruh DAU Terhadap KKD

Hasil pengujian menunjukkan variabel DAU memiliki nilai t hitung sebesar -23,520 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan nilai t hitung

> nilai t tabel ($-23,520 > 1,968$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya, secara parsial variabel DAU (X_2) berpengaruh terhadap KKD (Y).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 2 Hasil uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,586	2	,293	1372,880	,000 ^b
	Residual	,062	290	,000		
	Total	,647	292			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Data sekunder, diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8, diketahui bahwa variabel PAD dan DAU menghasilkan nilai F hitung sebesar 1372,880 beserta nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan nilai F hitung > nilai F tabel ($1372,880 > 3,027$) dan nilai signifikansi < 0,05 ($0,000 < 0,05$). oleh sebab itu, H_0 ditolak dan H_3 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel PAD (X1) dan DAU (X2) berpengaruh terhadap KKD (Y).

c. Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,951 ^a	,904	,904	,01460

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: Data sekunder diolah, 2025

Merujuk pada hasil analisis statistik yang tersaji pada tabel 9 menunjukkan nilai R Square (R^2) sebesar 0,904 atau 90,4%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel PAD dan DAU memiliki kapabilitas eksplanasi yang sangat tinggi terhadap KKD. Secara substantif, 90,4% variabel KKD dipengaruhi oleh kombinasi kedua variabel independen tersebut.

Pembahasan

1. Pengaruh PAD terhadap KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji parsial pada tabel 4.7 yang memiliki nilai t hitung senilai $52,335 > t$ tabel (1,968) beserta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresi variabel PAD menunjukkan nilai positif sebanyak 4,126 yang berarti setiap PAD mengalami kenaikan satu-satuan, maka KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur akan mengalami peningkatan sebesar 4,126. Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditarik inferensi bahwa terdapat korelasi positif antara PAD dengan KKD

Hal ini mengimplikasikan bahwa peningkatan pada kapasitas PAD akan berkontribusi secara proporsional terhadap peningkatan tingkat KKD.

Bird & Vaillancourt (1998) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda dalam aspek pengelolaan keuangan yang mencakup aspek penerimaan dan pengeluaran publik. Pemda dengan tingkat penerimaan daerah yang tinggi akan meningkatkan kapasitas fiskal yang dimiliki serta cenderung mencatatkan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap bantuan Pemerintah Pusat atau TKD, sehingga penerimaan daerah dapat menjadi indikator KKD. KKD dapat terwujud apabila kontribusi PAD lebih besar dalam membiayai urusan pemerintahan daripada bantuan Pemerintah Pusat.

Hasil temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan konsistensi (kesesuaian) dengan hipotesis yang telah diajukan, dan sejalan dengan temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Fadhila & Susilowati (2025), Debora et al. (2023), Riyandi & Anggraini (2022), Kristina et al. (2021), Novianti & Farouq (2022), Adriana & Rustam (2024), Indiraningrum & Priyono (2023), Nainggolan et al. (2023), Melly Pitria et al. (2023), Fadillah Yulkhaq & Amiranto (2024), Nur Indah Fitriyani et al. (2021), Rosana (2024), dan Bella et al. (2022) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD.

2. Pengaruh DAU terhadap KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Berdasarkan hasil temuan empiris dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel DAU memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara statistik terhadap KKD pada Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial pada tabel 4.7 yang memiliki nilai t hitung sebesar $-23,520 > t$ tabel (1,968) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien regresi variabel DAU menunjukkan nilai negatif sebesar $-1,517$ yang berarti setiap DAU mengalami kenaikan satu-satuan, maka KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur akan mengalami penurunan sebesar $1,517$. Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditarik inferensi bahwa setiap peningkatan DAU dapat menyebabkan penurunan terhadap KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Bird & Vaillancourt (1998) menjelaskan dampak antara DAU terhadap KKD. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada bantuan Pemerintah Pusat justru dapat melemahkan KKD, karena daerah cenderung pasif dalam menggali sumber PAD dan hanya menunggu alokasi dari Pemerintah Pusat atau TKD. Pemda yang sangat bergantung terhadap bantuan Pemerintah Pusat cenderung mempunyai KKD yang rendah. Kemajuan suatu Pemda tercermin dari kapasitasnya dalam menurunkan ketergantungan fiskal terhadap dana dari pusat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembiayaan urusan pemerintahan secara otonom.

Hasil temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan konsistensi (kesesuaian) dengan hipotesis yang telah diajukan, dan sejalan dengan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Nur Indah Fitriyani et al. (2021), Melly Pitria et al. (2023), Nainggolan et al. (2023), Anggi Wahyu Puspita & Gideon Setyo Budiwitjaksono (2023), Azari & Sutrisna (2022), dan Surya Abbas et al. (2024) bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap KKD.

3. Pengaruh PAD dan DAU terhadap KKD secara simultan pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap KKD pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pembuktian

statistik ini didukung oleh temuan Uji F, yang menunjukkan nilai F hitung yang lebih besar daripada F tabel, sehingga mengindikasikan adanya pengaruh secara simultan ($1372,880 > 3,027$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 0,904 atau 90,4% yang berarti KKD dapat dipengaruhi hingga mencapai 90,4% oleh variabel PAD dan DAU, sedangkan sisanya sebesar 9,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai F hitung mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat KKD. Secara lebih spesifik, peningkatan PAD berkontribusi secara positif terhadap kemandirian, sedangkan penurunan DAU turut memperkuat tingkat kemandirian tersebut. Dengan demikian, semakin besar proporsi PAD dan semakin kecil ketergantungan terhadap DAU, maka KKD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan, yaitu PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap KKD pada Kabupaten/Kota se- Jawa Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal Bird & Vaillancourt yang menyatakan bahwa KKD dipengaruhi oleh PAD dan DAU. Peningkatan KKD dapat dicapai apabila Pemda mampu memaksimalkan potensi PAD melalui pengelolaan sumber daya lokal yang efisien, serta secara bersamaan menekan proporsi penerimaan dari dana bantuan Pemerintah Pusat atau TKD. Kondisi tersebut mencerminkan kapasitas fiskal yang kuat dan otonomi keuangan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur selama periode 2014–2023. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan penting. Pertama, PAD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap KKD, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Kedua, DAU memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap KKD, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat justru dapat menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketiga, secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap KKD, yang berarti bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

REFERENSI

- Adriana, M., & Rustam, R. (2024). Analisa Determinan Kemandirian Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v4i2.8406>
- Afandi, M. N., Sianipar, R., Tinggi, S., Lembaga, I. A., & Negara, A. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. In *Jurnal Wacana Kinerja* (Vol. 19). <https://doi.org/https://doi.org/10.31845/jwk.v19i2.1>
- Afriyan Firmanda, R., Hodijah, S., & Vyn Amzar. (2024). Determinan kemandirian keuangan daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi. In *Journal Perdagangan Industri dan Moneter* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pim.v12i1.35878>
- Andrianda, Y., & Rosada, A. (2024). Pengaruh DBH, DAU, Dan DAK Terhadap Tingkat

- Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan. *SIKAP*, 8(2), 168-182.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32897/jsikap.v8i2.3206>
- Anggi Wahyu Puspita, & Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2023). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 01-13. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1836>
- Atmoko, C. A., & Khairudin, D. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295>
- Azari, D., & Sutrisna, I. K. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan DAU Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11. <https://jurnal.harianregional.com/eep/id-70883>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2022). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & EvIEWS) (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(03), 405-413. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i3.522>
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). Fiscal Decentralization in Developing Countries. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- Debora, D., Kantohe, M., Tarore, S. V., & Rantung, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8339>
- Fadhiilah, R., & Widiastuty, T. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2017- 2020). *Review of Accounting and Business*, 4, 17-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.52250/reas.v4i1.773>
- Fadhila, L. S., & Susilowati, D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Dan Kewirausahaan*, 12, 1428-1448. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4607>
- Fadillah Yulkhaq, M. Z., & Amiranto, J. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022). *Jurnal Bisnis*, 04. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/grjb.v4i02.1708>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah (4th ed.). Salemba Empat.
- Indiraningrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang Pada Tahun 2006 - 2021. *Jurnal Economia*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.269>
- Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180>
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Dj, H. F. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 9(1), 453-461. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32235>
- Kusmila, Z. (2023). Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. 7, 9226-9234. <http://repository.stie-sak.ac.id/69/> Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik.
- Melly Pitria, I., Wulandari, H. K., & Rahmawati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Periode 2018-2022). *Journal of Accounting and Finansial Research*. <https://jurnal.eraliterasi.com/index.php/jacfir/article/view/140>
- Nainggolan, A., Darius Sidauruk, T., & Tito, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.54964/liabilitas/https>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *JDEP*, 2(1), 30-45. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Novianti, D., & Farouq, J. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244-250. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Nur Indah Fitriyani, E., Endro Suwarno, A., & Muhammadiyah Surakarta, U. (2021). Pengaruh PAD, DAU, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1), 61-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.228>
- Nurvaliza, S., & Hamdani Putra, G. (2024). Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2>
- Putri, A., & Mulyandani, V. C. (2025). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah K. *Indonesian Accounting Research Journal*, 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v5i3.6613>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2143>
- Riyandi, M., & Anggraini, yeyen. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupatenkota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.

-
- <https://doi.org/https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Riza, R., & Zuripal. (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1961- 1973. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1508>
- Rosana, R. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Priangan Periode Tahun 2018- 2020). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://rjuwm.id/index.php/abinawa/article/view/31>
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515-1534. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9215>
- Setiawan, P., Widiyant, R., Siregar, L. M., Nurhaida, & Oktavia, E. (2021). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi*, 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Surya Abbas, D., Yulia, D., & Jayanih, A. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2(1), 72-84. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.575>
- Yahya, M., & Diah Widajantie, T. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar Informasi Artikel. *Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2, 317. <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/etnik.v2i4.177>

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA